



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH

---

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR : 180.18 / 44 / 2021

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
TAHUN 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menentukan skala prioritas penyusunan dan pembahasan serta meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan daerah, maka dipandang perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa dalam perkembangannya, Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Blora Nomor : 180.18/37/2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021, perlu dicabut dan disesuaikan;
  - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 1);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Blora Nomor: 180/3906 tanggal 12 November 2021 perihal Usulan Perubahan Program Pembentukan Perda Tahun 2021 dari Pemerintah Kabupaten Blora;
  2. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora tanggal 15 November 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan instrumen program dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora dalam Tahun 2021.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Nomor : 180.18/37/2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 15 November 2021  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BLORA  
KETUA,



TEMBUSAN: disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
  2. Bupati Blora.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BLORA  
NOMOR : 180.18 / 44 / 2021  
TANGGAL : 15 November 2021

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
TAHUN 2021**

**A. Raperda Umum**

NO.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PEMRAKARSA	KET.
			BARU	UBAH		
1.	Penyelenggaraan Kepariwisata	Penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata	V		DPRD	
2.	Kerja Sama Daerah	Penyesuaian ketentuan mengenai kerja sama daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga	V		DPRD	
3.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Perubahan regulasi mengenai penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah		V	DPRD	
4.	Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu Pemerintahan Daerah	Regulasi mengenai perencanaan pembangunan dan penganggaran terpadu dalam sistem pemerintahan daerah Kabupaten Blora	V		DPRD	

NO.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PEMRAKARSA	KET.
			BARU	UBAH		
5.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Perubahan ketentuan mengenai besaran tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		V	DPRD	
6.	Perusahaan Umum Daerah Air Minum "Tirta Amerta" Kabupaten Blora	Perubahan Nomenklatur dan Ketentuan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 1 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amerta Kabupaten Blora Daerah Tingkat II Blora	V		DPRD	
7.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan Daerah	V		PEMKAB	
8.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2020-2040	Tindak Lanjut Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011-2031	V		PEMKAB	
9.	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Blora	Merupakan amanat Pasal 10-11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Penyusunan Rencana Pembangunan ini mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	V		PEMKAB	
10.	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Blora pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Blora dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah	Perubahan Penyertaan Modal	V		PEMKAB	

NO.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PEMRAKARSA	KET.
			BARU	UBAH		
11.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora	Penambahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan mengubah bentuk dari semula Kantor/Badan dengan pimpinan eselon III menjadi setara Dinas dengan pimpinan eselon II		V	PEMKAB	
12.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2024	Melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (untuk setiap masa jabatan Bupati/Wakil Bupati masa bhakti 2021-2024)	V		PEMKAB	
13.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Perubahan Struktur dan besaran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		V	PEMKAB	

**B. Raperda Kumulasi Terbuka**

<b>NO.</b>	<b>JUDUL</b>	<b>MATERI POKOK</b>	<b>PEMRAKARSA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Akibat Putusan Mahkamah Agung	Kumulasi terbuka akibat putusan Mahkamah Agung	PEMKAB	
2.	Penataan Kecamatan/Penataan Desa	Kumulasi terbuka penataan Kecamatan/Desa	PEMKAB	
3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Kumulasi terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	PEMKAB	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BLORA

